

## Perlawanan LSM Terhadap PT Indorayon

*Mochtar Haboddin, S.IP<sup>1</sup>*

### **Abstrak**

*This paper discusses the struggle of environmental NGO in protecting the environment. Through the case of PT Indorayon paper pulp and rayon fiber plant in North Sumatra, this paper highlights a new approach of NGO's strategy in protecting environment from industrial exploitation. By combining traditional approach such as protest and demonstration with formal and legal channel as well as network among NGOs, the movement has successfully forced PT Indorayon to close down. This paper suggests that the case of NGOs movement against PT Indorayon, could become a model of social movement in Indonesia, particularly in environmental issues.*

**Kata kunci:** LSM, Lingkungan dan Indorayon

### **Pengantar**

PT. Inti Indorayon Utama (IIU) merupakan perusahaan yang mendapat perlawanan, baik dari masyarakat setempat, komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Perlawanan masyarakat setempat diekspresikan dalam bentuk penolakan kehadiran IIU di Kecamatan Porsea karena dampak ke-

---

<sup>1</sup> Mochtar Haboddin, S.IP adalah mahasiswa S2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

rusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Misalnya limbah tumpah dan mencemari Sungai Asahan, terjadi hujan asam yang merusak atap rumah yang terbuat dari seng, hasil panen yang buruk, pencemaran udara yang mengganggu saluran pernafasan masyarakat dan seterusnya.<sup>2</sup> Kerusakan lingkungan yang disuarakan masyarakat mempunyai titik temu dengan gerakan LSM yang mencermati terhadap isu perusakan dan pencemaran lingkungan. Isu inilah yang merupakan pintu masuk bagi LSM untuk menceburkan diri dalam membantu dan memperkuat tuntutan perjuangan masyarakat dalam melawan eksistensi PT IJU.

Meskipun PT. IJU mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, perlawanan masyarakat dan LSM tetap berjalan dengan memperkuat bangunan aliansi gerakan dan jaringan antar organisasi di tingkat lokal maupun nasional. Pada tingkat lokal penguatan organisasi 'di akar rumput' dan memperluas solidaritas dukungan dengan organisasi lain terus dilakukan. Sementara pada tingkat pusat LSM yang berskala nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) digandeng.

Dengan memperkuat kerja jaringan LSM, penyebaran isu dan konsolidasi kekuatan antar LSM semakin kuat dalam melakukan perlawanan terhadap PT IJU. Sebagaimana dikatakan oleh Wahyudi bahwa keberhasilan sebuah perlawanan LSM sangat tergantung pada kesanggupannya untuk mengaitkan dirinya dengan kelompok-kelompok atau organisasi besar yang ada di pusat. Pusat di sini maknanya bukan hanya di Jakarta saja tetapi pusat gerakan yang bisa berada di daerah ataupun luar negeri.<sup>3</sup>

Apa yang disampaikan Wahyudi sudah dilakukan oleh LSM di Medan. Melalui jaringan LSM di Jakarta, Walhi dan YLBHI berkontribusi dalam membantu perlawanan LSM di Medan. Peran besar Walhi dan YLBHI tercermin dari sikapnya yang berani mengajukan tuntutan hukum IJU dan lima badan pemerintah yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag), Menteri Kehutanan (Menhut), Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (MNKLH), dan Gubernur Sumatra Utara. Tidak

---

<sup>2</sup> Victor Silaen (2006). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: IRE, hlm 129

<sup>3</sup> Wahyudi (2005). *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani*. Malang: UMM Press, hlm.41.

hanya itu, gugatan Walhi dan YLBHI juga meminjam istilah Suharko telah memermalukan Presiden Soeharto secara pribadi.<sup>4</sup> Implikasi dari gerakan ini adalah perusahaan semakin represif terhadap segala tuntutan yang suarakan masyarakat maupun LSM. Misalnya PT IJU menggunakan aparat kepolisian yang dikenal dengan istilah operasi Brimob terhadap perlawanan rakyat di Kecamatan Uluhan dilakukan dengan cara penangkapan dan pemukulan warga.<sup>5</sup>

Serepresif apapun tindakan yang dilakukan perusahaan, perlawanan LSM tak pernah surut. Bahkan di tengah suasana semacam ini perlawanan LSM membuahkan hasil. Hal ini nampak pada keberhasilannya memaksa PT IJU untuk menyesuaikan standarisasi pengelolaan lingkungan sekaligus memperbaiki relasinya dengan masyarakat di sekitarnya. Tulisan ini mengangkat kisah perlawanan LSM terhadap PT IJU. Fokus yang dikaji lebih banyak berbicara taktik dan strategi LSM dalam melawan PT.IJU. Namun, sebelum tulisan ini membahas pokok soal terlebih dahulu memaparkan tentang konsepsi LSM.

### **LSM Sebagai Aktor Perlawanan**

Kehadiran LSM dalam dua puluh tahun terakhir merupakan fenomena menarik untuk dikaji. Kehadirannya sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kehadiran, kiprah, sumbangsih, dan sejumlah cerita sukses sudah digoreskan, tetapi pembicaraan tentang LSM itu sendiri masih diperdebatkan definisinya. Dengan kata lain, definisi LSM sangat variatif dan tidak tunggal.

Sebagai contoh, George Dominggo Rinels Hormat mendefinisikan LSM sebagai semua organisasi non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup> Sementara Mansour Fakih menjelaskan LSM adalah:

---

<sup>4</sup> Suharko (2005). *Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah dan Pembangunan Tata Pemerintahan Demokrasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 160

<sup>5</sup> N Kusuma dan Fitria Agustina (2004). *Gelombang Perlawanan Rakyat*. Jakarta: Insist, hlm. 278.

<sup>6</sup> George Dominggo Rinels Hormat 'LSM di Mata Ormas Gerakan Rakyat: Kawan dan Lawan' dalam. HCB Dharmawan (ed). *LSM Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*. Jakarta: Kompas, hlm.41

*"Mereka yang mendukung kerja kelompok akar rumput melalui pendanaan, nasihat teknis dan advokasi, atau gerakan akar rumput dari jenis yang beragam dan organisasi yang dikendalikan oleh anggotanya sendiri dengan mempunyai jaringan kerja yang terdiri dari beberapa atau seluruh tipe LSM"?*

Sekalipun dua definisi ini sangat luas dalam memahami LSM, tapi satu hal yang pasti yakni LSM memiliki semangat bersama dalam pemberdayaan masyarakat. Semangat pemberdayaan dan pendampingan masyarakat mengharuskan LSM bersentuhan dengan simpul pemegang otoritas kekuasaan, entah itu pemerintah maupun pengusaha. Sebagai contoh, kasus gugatan Walhi terhadap praktik pertambangan Freeport-McMoRan Coper & Gold di Timika, Irian Jaya, yang dianggap merusak lingkungan hidup dan mengabaikan hak adat penduduk setempat.

Gugatan Walhi terhadap Freeport bisa dimaknai sebagai bentuk keberpihakan terhadap isu lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat setempat. Kejadian semacam ini juga terjadi di tempat lain. Kasus Kedung Ombo menunjukkan kegigihan LSM dalam melakukan perlawanan pembangunan bendungan. Hal yang serupa juga terjadi di Porsae dimana para aktivis LSM se-Medan melakukan perlawanan terhadap PT. IIU.

Aksi perlawanan yang dilakukan oleh LSM terhadap perusahaan membuktikan bahwa LSM mempunyai posisi tawar di hadapan para modal. Dalam kasus tertentu LSM bahkan menjadi batu sandungan bagi perusahaan. Lewat sikap kritisnya dalam mengawasi kinerja perusahaan seringkali aktivis LSM berbenturan dengan kepentingan perusahaan. Berbenturan dengan perusahaan sudah menjadi risiko bagi aktivis LSM. Karena itu para aktivis LSM berani bersuara dan menantang. Apalagi jika isu yang diangkat itu mendapat dukungan moral dari masyarakat. Sudah bisa dipastikan gerakan perlawanan akan berskala besar gaungnya.

### **Dilema Pertumbuhan dan Lingkungan**

Kekeliruan yang terjadi selama ini adalah ketika pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi maka pada saat yang sama juga terjadi ke-

---

<sup>7</sup> Mansour Fakih. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.3

rusakan lingkungan yang cukup signifikan. Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan terpaksa diterima oleh masyarakat Porsae sebagai kenyataan pahit dari proyek yang mengatasnamakan pembangunan.

Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan merupakan bukti penting bahwa pemerintah baru menomorsatukan aspek ekonomi sementara aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan terabaikan. Padahal paradigma pembangunan berkelanjutan berupaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek, yakni aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan hidup. Ketiga aspek ini saling terkait erat satu sama lain, sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan.<sup>8</sup>

Paling sedikit ada lima dilema antara pertumbuhan ekonomi dan perusakan lingkungan yang bisa disebutkan. Pertama, kemajuan ekonomi yang dicapai selama ini telah membawa kerugian yang sangat mahal di sisi sosial-budaya dan lingkungan hidup. Kehancuran sosial-budaya dan lingkungan hidup menyebabkan negara dan masyarakat lokal membayar mahal, bukan saja dalam hitungan nilai finansial melainkan juga dalam bentuk kehancuran kekayaan sosial-budaya dan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kedua, dominasi pandangan bahwa alam berada di bawah taklukan dan kendali manusia. Karena itu manusia bebas memperlakukan alam sekehendak hatinya. Etika semacam ini tidak cocok dengan keinginan kita untuk menjaga dan melestarikan alam. Etika semacam ini terlalu mementingkan kepentingan ekonomis. Akibatnya: terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan demi kepentingan ekonomi manusia.<sup>9</sup> Ketiga, persoalan pelestarian lingkungan adalah persoalan jangka panjang, padahal sebagian besar perusahaan justru peduli dengan kepentingan jangka pendek.<sup>10</sup> Keempat, idealnya masyarakat Porsae merasa bangga dengan adanya industri di daerah mereka, namun yang terjadi justru sebaliknya proyek pembangunan itu mendapat reaksi protes dan penolakan. Penyebabnya jelas karena masyarakat tidak

---

<sup>8</sup> A. Sonny Keraf (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, hlm. 168.

<sup>9</sup> A. Sonny Keraf (2000). 'Manusia dan Lingkungan Hidup: Mencari Model Etika Lingkungan'. *Respons*, Vol 5, No.02, hlm. 76.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 79

merasakan manfaatnya, baik secara ekonomi maupun sosial.<sup>11</sup> Kelima, keberadaan Indorayon meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Namun peningkatan tersebut relatif tidak berarti, karena sebagian besar dari masyarakat sekitar adalah pekerja kasar dengan gaji relatif kecil.<sup>12</sup>

Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan membuktikan bahwa pemerintah dan PT IJU masih menggunakan nalar antroposentrik.<sup>12</sup> Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proses pembangunan industrialisasi menunjukkan bahwa pemerintahan maupun perusahaan belum mempunyai kepedulian dan kesadaran terhadap alam atau lingkungan hidup. Ketika kerusakan lingkungan dan kemiskinan ekonomi masyarakat semakin parah maka kesadaran untuk melawan menemukan momentumnya.

### **Gerakan Perlawanan LSM**

Gerakan perlawanan yang dilakukan LSM terhadap perusahaan merupakan fenomena massif dan masuk pada peta politik global. Dikatakan demikian karena di aras global gerakan perlawanan LSM terhadap kekuatan ekonomi dunia semakin gencar dilakukan. Bahkan, di negara-negara maju berhaluan neoliberal, korporasi-korporasi ekonomi menjadi sasaran perlawanannya.<sup>13</sup>

Keterkaitan antar LSM baik dalam maupun luar negeri biasanya didasarkan pada basis isu dan sektor yang ditekuni. Dalam konteks aksi penyelamatan lingkungan hidup misalnya LSM lokal maupun nasional biasanya berjejaring dengan *Greenpeace Internasional* dalam rangka memperkuat posisi dalam menyuarakan aksi perlawanan terhadap pihak perusahaan maupun pemerintah yang gemar melakukan pengrusakan lingkungan.

Adapun aksi gerakan perlawanan yang biasa dilakukan oleh LSM terhadap perusahaan misalnya berbentuk protes, pemogokan ataupun menolak untuk melakukan kerjasama.<sup>14</sup> Senada dengan itu, Gene Sharp mengatakan bahwa dalam gerakan perlawanan LSM lebih mengandalkan satu atau dua metode saja yakni pemogokan atau demonstrasi mas-

<sup>11</sup> Victor Silaen. *Op.cit.* hlm 236.

<sup>12</sup> Victor Silaen., *ibid*, hlm. 96.

<sup>13</sup> Muhadi Sugiono dan Vicky de Djalong (2007). "Gerakan Perlawanan dalam Ruang Politik Global". *Balairung*, Edisi 41/XXII, hlm. 7

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 7

sa.<sup>15</sup> Sementara Jeff Haynes dalam bukunya *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga* menyebutkan lima pola perlawanan LSM terhadap perusahaan. Pertama, mengerahkan penduduk setempat guna mempertahankan lingkungan setempat terhadap kepentingan pihak luar yakni perusahaan besar. Kedua, LSM yang berbasis masyarakat lokal LSM yang selalu berkeinginan melindungi ekologi lokal berhadapan dengan kepentingan kelompok bisnis yang hendak menghancurkannya. Ketiga, beberapa kelompok LSM yang memiliki fokus pelestarian lingkungan memiliki kepentingan sosial-ekonomi dan politik yang lebih luas. Keempat, LSM harus didorong menggunakan saluran demokrasi dan hukum. Kelima, kelompok LSM bersekutu dengan mereka yang berada di luar negeri seperti *Greenpeace Internasional*.<sup>16</sup>

Dari Gene Sharp dan Jeff Haynes kita bisa menemukan keberagaman pola gerakan perlawanan LSM terhadap perusahaan. Keberagaman pola gerakan perlawanan boleh jadi sangat ditentukan oleh situasi kondisi politik wilayah masing-masing. Di daerah yang belum memiliki masyarakat sipil yang kuat gerakan perlawanan LSM lebih banyak menggunakan pola yang ditawarkan oleh Gene Sharp yakni protes dan demonstrasi massa. Tetapi bagi daerah yang memiliki kekuatan masyarakat sipil yang kuat, perlawanan LSM akan memadukan antara protes—demonstrasi massal dengan menggunakan saluran demokrasi dan hukum serta berjejaring dengan LSM lain.

Dalam konteks gerakan perlawanan LSM di Medan perpaduan inilah yang dipraktekkan. Pola perlawanan yang berbasis protes—demonstrasi, menggunakan saluran demokrasi dan hukum serta ditopang dengan jaringan antar LSM—ikut memperkuat solidaritas perlawanan terhadap PT Indorayon. Pendek kata, pola perlawanan LSM di Medan merupakan perpaduan antara alur pemikiran Gene Sharp dan Jeff Haynes.

### **Perlawanan Awal**

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa keterlibatan LSM dalam gerakan melawan PT.IIU karena kerusakan lingkungan dan kemerosotan

---

<sup>15</sup> Gene Sharp (1997). *Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm.38

<sup>16</sup> Jeff Hayne (2000). *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*. Jakarta: YOI, hlm. 164

ekonomi sebagai akibat dari limbah industri maupun proses industrialisasi yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Kesadaran akan dampak industrialisasi memicu masyarakat lokal dan LSM untuk melakukan berbagai aksi, demonstrasi hingga pada upaya legal formal dengan cara mengajukan tuntutan hukum untuk melawan badan pemerintah dan perusahaan IJU karena dinilai telah merusak lingkungan.

Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 1988 tempat penampungan limbah jebol dan air limbah tersebut mengalir ke Sungai Asahan yang tercemari sepanjang 80 persen km. Akibatnya semua jenis ikan yang ada di sungai mati terapung dan busuk, rakyat tidak berani mengambilnya karena takut keracunan. Selain itu, air Sungai Asahan juga berubah menjadi hitam, berbuih, dan berbau.<sup>17</sup> Peristiwa tersebut ditanggapi A. Sonny Keraf sebagai perilaku yang tidak bertanggungjawab dan tidak peduli terhadap lingkungan.<sup>18</sup>

Kerusakan lingkungan yang dilakukan PT. IJU terjadi ketika Kelompok Anti Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (KAPAL) mengklaim bahwa PT. IJU telah secara massif menebang hutan pinus sehingga menyebabkan bencana kekeringan dan terganggunya *suplay air* untuk lahan pertanian.<sup>19</sup> Tuduhan KAPAL tersebut dibantah oleh pihak PT IJU. Bantahan PT. IJU terhadap tuduhan KAPAL pada gilirannya menimbulkan perselisihan yang semakin meruncing antara kedua belah pihak.

Implikasi dari semua itu adalah bidang ekonomi rakyat setempat. George Junus Aditjondro mencatat bahwa sistem perekonomian terpadu (pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan rakyat) yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sudah hilang, tersingkir dan tersungkur.<sup>20</sup> PT. IJU tidak hanya 'membangkrutkan' kepentingan ekonomi rakyat Batak akar rumput, tetapi juga pengusaha yang tergolong UKM milik penduduk Sumut. Ditambahkan pula, bahwa keberadaan PT. IJU membuat kehidupan masyarakat menjadi susah, tanaman pangan tidak subur, hidupnya mereka semakin teralienasi dalam lingkungan Porsea.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Kusuma & Fitria Agustina *Gelombang Perlawanan Rakyat, op.cit.* hlm.251

<sup>18</sup> A. Sonny Keraf. *Etika., op.cit.* hlm XIV.

<sup>19</sup> Suharko (2004). "Negara, Pelaku Bisnis dan Masyarakat Sipil" dalam Lambang Trijono dkk (ed) *Potret Retak Nusantara*. Yogyakarta: CSPA, hlm. 303.

<sup>20</sup> George Junus Aditjondro (2001). "Gurita RGM, Pers dan Kedasaran Palsu" Kata Pengantar dalam J Anto "Limbah Pers di Danau Toba". Yogyakarta: LP3Y

<sup>21</sup> Jurnal Wacana XII/2002.

Kendatipun PT.IIU telah berbuat salah tapi pemerintah masih tetap membela dan mempertahankan dengan menyangkal semua tuduhan yang ditujukan kepada PT IIU. Pembelaan pemerintah nampak dari pernyataan Sudomo selaku Menko Polkam pada saat itu yang berkunjung ke Indorayon. Menurut Sudomo "air yang berasal dari Unit Pengelolaan Limbah (UPL) cukup aman, seraya meminum air dari gelas dan disiarkan melalui TVRI".<sup>22</sup>

Apa yang dilakukan Sudomo menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan ketimbang masyarakat yang notabene merasakan dampaknya secara langsung. Pemihakan pemerintah terhadap PT IIU merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Akibatnya adalah muncul kejengkelan LSM terhadap PT IIU yang selalu berlindung dibalik kekuasaan negara. Kejengkelan masyarakat dan LSM akibat limbah PT. IIU dieksploitasi untuk dijadikan tema perlawanan. Tema pencermaran lingkungan merupakan isu yang paling krusial dijadikan landasan perjuangan dalam rangka memprotes dan menolak keberadaan Indorayon di Kabupaten Toba Samosir. Penolakan masyarakat lokal diekpresikan lewat demonstrasi sementara Walhi pusat maupun daerah aktif menyebarkan wacana melalui media massa sekaligus mengugat lewat jalur hukum.

### **Pola Perlawanan Melawan lewat Jalur Parlemen Jalanan**

Isu perusakan lingkungan yang dilakukan PT. IIU tetap menjadi tema sentral. Melalui pendampingan LSM yang bekerjasama dengan penduduk korban PT. IIU secara bertahap tumbuh menjadi gerakan radikal dalam mengekspresikan tuntutanannya. Radikalisme gerakan tidak hanya nampak dari bunyi spanduk: "PT IIU buat rakyat Samosir sengsara", "PT. IIU pastikan henggang" massa juga meneriakkan yel-yel "Indorayon tutup", tetapi juga diiringi dengan tumbuh-layunya organisasi yang menampingi. Sebut saja Kelompok Studi Prakarsa dan Pengembangan Masyarakat (KPSPPM), Suara Rakyat Bersama (SRB), dan Walhi Sumut.

Tidak hanya itu, KAPAL juga mengalami perubahan orientasi dalam melakukan perlawanan terhadap PT.IIU. Dikatakan demikian, kare-

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 256.

na KAPAL memainkan peran ganda dalam melawan PT.IIU. Di satu pihak mengorganisir aksi-aksi rakyat di lapangan, sementara di pihak yang lain juga memprakarsai pertemuan-pertemuan antara pihak pemerintah, PT.IIU, dan masyarakat korban. Peran ganda ini tidak memuaskan masyarakat korban dan sebagian LSM.

Dari penelusuran berbagai sumber menyebutkan bahwa aksi jalanan masih menjadi pilihan yang diminati oleh LSM dalam melakukan perlawanan terhadap PT IIU. Mengapa? Karena taktik aksi jalanan merupakan strategi untuk membangun kekuatan mereka di masyarakat lokal maupun nasional. Data lapangan menunjukkan bahwa sejumlah aksi-aksi jalanan dilakukan oleh LSM seringkali berakhir dengan bentrok fisik. Mengenai jumlah korban kekerasan akibat bentrokan terlihat pada tabel 1

**Tabel 1**  
**Jumlah korban kekerasan**

No	Luka	Ditangkap	Meninggal	Waktu Kejadian
1	-	10	-	10 April 1989
2	1	-	-	1993
3	75	25	-	1998
4	-	2	-	2 September 1998
5	27	5	-	17 September 1998
6	36	4	-	26 November 1998
7	5	-	-	18 Maret 1999
8	-	14	-	Mei 1999
9	-	-	1	2001
10	-	13	1	21 Juni 2001

Diolah dari banyak sumber

Perusakan aset PT IIU oleh masyarakat merupakan bentuk kongkrit dari sebuah perlawanan. Kendatipun demikian PT IIU tetap bertahan. Bila perlu untuk membendung perlawanan itu, pihak perusahaan biasanya menggunakan militer dan kepolisian. Karena itu, perlawanan masyarakat terhadap perusahaan seringkali berhadapan dengan laras senjata.

Cara kerja PT IIU yang mengandalkan kekerasan dalam menangani tuntutan masyarakat setempat menuai kritik. Misalnya saja PT. IIU disamakan dengan simbol atau lambang kesombongan dan keangkuhan pemilik modal terhadap masyarakat korban kerusakan lingkungan. Celakanya lagi PT. IIU tidak mau peduli dan tak mau mengerti terhadap

protes masyarakat. Arogansi PT. IIU semakin memperkuat perlawanan masyarakat bersama LSM yang terus melakukan tekanan sembari mengembangkan jaringan antar organisasi.

### **Melawan lewat Jalur Jejaring**

Data menyebutkan bahwa sebanyak 14 LSM se-Sumatra Utara secara rutin melakukan perlawanan terhadap keberadaan PT. IIU di Porsea. Perlawanan rakyat yang terorganisir dengan mendepankan jejaring antar LSM baik secara horizontal maupun vertikal semakin intensif. Solidaritas LSM yang selama ini mendampingi masyarakat korban terpaksa dibagi dua sebagaimana hasil dari kesepakatan yang dibuat antara Walhi dengan SRB. Yakni SRB akan berperan mengorganisir rakyat di lapangan, sementara untuk urusan di Medan dan juga untuk jaringan ke Jakarta diserahkan kepada Walhi.

Pembagian kerja yang jelas tentu saja diharapkan mampu mempengaruhi pemerintah maupun sekutunya yakni PT. IIU. Karena Walhi yang mempunyai jaringan nasional segera melakukan lobi-lobi dengan pejabat negara (eksekutif maupun legislatif) maupun menyebarkan informasi dan opini ke berbagai kalangan, baik di pusat maupun di daerah yang dilakukan secara bersama-sama.

Gencarnya perlawanan yang dilakukan masyarakat lokal bersama LSM membuat Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat turun tangan. Karena dua hal; *pertama*, struktur politik yang sudah berubah seiring dengan runtuhnya kekuasaan Soeharto. Terkait dengan itu, maka perlawanan masyarakat lokal dan LSM semakin kuat dan semakin efektif mempengaruhi PT. IIU. Hasil reportase Kompas menyebutkan:

*“Di tengah arus reformasi pro-kontra PT. IIU merebak ke seluruh jaringan LSM dan masyarakat lokal sehingga praktis tidak ada lagi yang layak menjadi penengah. Ribuan ibu-bapak di daerah Toba Samosir beserta anak-anak mereka berunjuk rasa. Sekitar 50 LSM diberbagai bidang menceburkan diri ke dalamnya. Sedikitnya 100 ahli dengan berbagai spesialisasi menghabiskan ratusan jam untuk membahas layak tidak PT. IIU beroperasi”.*<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Kompas, 6 Agustus 2003

Yang *kedua* adalah pemerintahan pusat juga direpotkan karena dalam tubuhnya sendiri terjadi perpecahan. Misalnya pada era Habibie, Menteri Lingkungan yang dijabat putra Batak yakni Panagian Siregar mendukung tuntutan masyarakat lokal bersama LSM supaya PT. IIU ditutup secara permanen. Hal yang sama juga terjadi pada masa pemerintahan Gus Dur, ketika Sonny Keraf selaku Menteri Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi tentang perlunya penutupan PT. IIU. karena tidak melaksanakan Rencana Kelola lingkungan, Rencana Peman-tau lingkungan, dan pembuangan limbah beracun dan berbahaya.<sup>24</sup>

### **Melawan Lewat Jalur Hukum (litigasi)**

Perlawanan lain yang dilakukan LSM terhadap PT. IIU adalah dengan menempuh jalur hukum. Jalur ini digunakan karena UUPLH 1982 memberikan dasar legitimasi bagi aktivitas LSM yang bergabung bersama Walhi untuk terlibat dalam mengontrol perusahaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah maupun PT. IIU.

Melalui bantuan hukum di YLBHI, Walhi mengajukan tuntutan kepada lima badan pemerintah: Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri lingkungan Hidup dan Gubernur Sumatra Utara. Agen-agen pemerintah ini, khususnya Menteri Lingkungan Hidup, digugat karena telah memberikan rekomendasi untuk proyek industri tersebut. Walhi mengatakan bahwa PT IIU dan pemerintah tidak menjalankan peraturan lingkungan dan harus bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi.<sup>25</sup>

Tuntutan YLBHI dan Walhi ini mendapat liputan media massa, baik dalam maupun luar negeri. Keberhasilan Walhi bersama YLBHI mengajukan gugatan hukum dan mempraperadilan PT. IIU serta pemerintah digambarkan sebagai suatu pengadilan sipil pertama terhadap pemerintah Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan aksi dimana eksponen LSM mengajukan gugatan hukum kepada pemerintah. Selain itu, aksi ini juga merupakan respon terhadap Emil Salim yang pernah menyatakan bahwa atas nama hukum dan lingkungan setiap warga negara

---

<sup>24</sup> Hering Parlan (2002). *"Reposisi Gerakan Lingkungan Menuju Gerakan Sosial"*. Jurnal Wacana XII, hlm. 56.

<sup>25</sup> Suharko, *Merajut.., op.cit.* hlm. 160.

berhak menuntut berbagai bentuk pencemaran lingkungan.<sup>26</sup>

Konfrontasi Walhi bersama YLBHI mengagetkan semua pihak termasuk Emil Salim sendiri. Dari peristiwa ini Walhi membangun citra baik dimata masyarakat maupun di lingkungan LSM. Bahkan dengan cara ini Walhi telah menunjukkan kemampuannya dalam mengoreksi kesalahan, penyimpangan PT IJU yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah tentang Analisa Dampak Lingkungan.

Keberhasilan Walhi dan YLBHI dalam mengungkap penyimpanan hukum tidak serta merta membawa kemenangan. Sebab sejarah telah mencatat bahwa dalam perjalanan gugatan Walhi bersama YLBHI berakhir dengan kekalahan sedangkan pihak pemerintah bersama PT. IJU keluar sebagai pemenangnya. Namun, satu hal yang pasti yakni perlawanan Walhi telah menancapkan tonggak baru dalam sejarah advokasi lingkungan di Indonesia. Perlawanan Walhi merupakan 'kemenangan moral'.

Peristiwa di atas kembali hadir pada tahun 2000. Walhi, ICEL, dan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang kecewa terhadap keputusan pemerintah berencana mengajukan gugatan hukum terhadap badan-badan pemerintah dan PT. IJU. Mereka mendatangi dan meminta Mabes Polri untuk mengambil tuntutan pelanggaran yang dilakukan PT IJU.<sup>27</sup> Dengan kata lain, langkah hukum yang diambil LSM bersama masyarakat lokal merupakan bagian dari strategi UU Pengelolaan Hukum Lingkungan.

Implikasi dari gelombang perlawanan masyarakat lokal dan LSM terhadap PT. IJU memaksa pemerintah untuk bersikap. Sikap pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat lokal dan LSM dengan mendirikan lembaga audit independen. Bersamaan dengan itu pihak PT. IJU melakukan pembenahan, baik secara internal maupun eksternal.

### **Audit Lingkungan**

Audit lingkungan dilakukan untuk memastikan apakah PT. IJU melanggar UU Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dituduhkan

---

<sup>26</sup> Adi Suryadi Culla (2006). *Rekonstruksi Civil Society*. Jakarta: LP3ES, Walhi dan YLBHI, hlm. 121.

<sup>27</sup> Suharko., *Negara.,op.cit.* hlm. 318.

masyarakat lokal dan LSM selama ini. Dalam konteks audit lingkungan terhadap PT. IJU, pemerintah pusat sudah melakukan dua kali. Yakni pada tahun 1994 dan pada tahun 1999. Dari dua audit lingkungan itu menunjukkan bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan dalam hal:

1. *Polusi limbah gas*. Selama proses produksi pulp, berbagai limbah gas yang beracun dihasilkan. Limbah gas ini terbuang ke udara dan menyebabkan terjadinya pencemaran udara secara luas. PT. IJU dinilai gagal menangani semua gas-gas yang terbuang itu.
2. *Polusi limbah cair*. Kolam dan bak penampung limbah yang dibangun PT. IJU jebol pada tahun 1988 dan 1994, akibatnya seluruh air limbah tumpah ke Sungai Asahan. Hasil audit *Labat-Anderson* yang mengukur derajat keasaman air Sungai Asahan menemukan adanya perubahan derajat keasaman dari 8,73 menjadi 8,83. selain itu, tim audit juga menemukan bukti adanya buangan polutan yang tidak terkontrol (padatan terapung, minyak dan zat-zat organik lainnya) yang masuk ke Sungai lewat pembuangan air hujan;
3. *Polusi limbah padat*. Terdapat pembuangan limbah padat yang tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran.<sup>28</sup>
- 4.. PT IJU telah dengan jelas melalaikan dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan pengendalian pencemaran lingkungan, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Menteri Negara Lingkungan Hidup meminta kepada Ketua BKPM dan pejabat lain yang berwenang untuk menutup PT. IJU.<sup>29</sup>

Bersadarkan dua penelitian yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup bukti untuk memberi hukuman kepada PT. IJU. Namun pemerintah tidak punya keberanian untuk mengeksekusi. Sonny Keraf yang bernada keras sebagaimana nampak pada poin 4 pun melunak. Diduga melunaknya sikap Sonny Keraf akibat adanya tekanan dari berbagai pihak.<sup>30</sup>

Sementara untuk poin 1 sampai 3 dari hasil temuan *Labat-Anderson* ditanggapi balik oleh pihak PT. IJU, melalui organisasi yang me-

---

<sup>28</sup> J. Anto (2001). *Limbah Pers di Danau Toba*. Yogyakarta: LP3Y dan Kippas. hlm 28-29

<sup>29</sup> Suharko. *op.cit.* hlm.317

<sup>30</sup> Tempo, edisi, 22-28 Mei 2000.

namakan diri *Masyarakat Pencinta Toba-Lestari*. Organisasi ini menerbitkan buku yang disebarluaskan ke seluruh pers di Sumatra Utara. Menurut Palgunadi Setiawan selaku Presiden Direktur bahwa Audit *Labat-Anderson* lebih bersifat kepentingan manajemen, sehingga tidak mencerminkan aspek sosial, ekonomi dan lainnya.<sup>31</sup>

Palgunadi bisa saja menolak hasil Audit *Labat* dengan berbagai argumentasi. Namun patut dicatat bahwa temuan *Labat* tentang kerusakan lingkungan kembali mendapat pembenaran melalui penelitian yang dilakukan Jurusan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, menyebutkan bahwa limbah industri yang dikeluarkan Indorayon memang positif mengganggu kesehatan masyarakat. Data pengukuran udara di tiga lokasi di Kecamatan Porsea mengindikasikan bahwa bau busuk itu berasal dari pabrik. Sementara di Siruar, tempat limbah cair Indorayon dibuang, telah terjadi perubahan ekosistem air Sungai Asahan secara tajam seperti warna kekeruhan.

Beberapa gangguan klinis juga ditemukan pada warga yang tinggal di dekat Sungai Asahan dan di Tepi Danau Toba. Jenis gejala klinis tersebut adalah: gangguan kulit; gangguan saluran pernapasan, tenggorokan kering; sesak napas tanpa bunyi dan pilek dengan ingus warna kuning-hijau; gangguan saluran pencernaan: mual, gangguan alat penglihatan, mata perih, mata gatal, mata berair dan penglihatan kabur; gangguan system syaraf: pusing dan berkunang-kunang.<sup>32</sup>

### **Penyesuaian kebijakan Indorayon**

Apa yang disuarakan masyarakat lokal dan LSM ternyata terbukti melalui audit lingkungan yang dilakukan pemerintah. Kerusakan lingkungan, berupa polusi udara, pencemaran sungai asahan sebagai bukti kelalaian PT. IJU. Kendatipun demikian, PT. IJU masih bertahan. Masyarakat lokal dan LSM tidak punya kuasa untuk memberhentikan PT. IJU sementara pemerintah tidak berani mengeluarkan sanksi yang tegas.

Ketidaktegasan pemerintah membuat PT. IJU melakukan jalan moderat untuk membendung perlawanan rakyat lokal dan LSM dengan melakukan tujuh penyesuaian kebijakan, yakni: *pertama*, akan menggu-

---

<sup>31</sup> J Anto *Limbah.*, *op.cit.* hlm. 32.

<sup>32</sup> J Anto., *op.cit.* hlm 28-31.

nakan teknologi ramah lingkungan. *Kedua*, memanfaatkan sumber daya alam ramah lingkungan yang berpola pada kemitraan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. *Ketiga*, program pengelolaan dana 1 persen dari keuntungan per tahun.<sup>33</sup> *Keempat*, pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. *Kelima*, tanggungjawab sosial kemasyarakatan. *Kenam*, menerima lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan paradigma baru perseroan. *Ketujuh*, mengutamakan putra daerah setempat dalam pengangkatan karyawan.<sup>34</sup>

Tujuh kebijakan ini diberi label paradigma baru PT. IIU. Namun sayang paradigma baru yang dibangun dan disebarluaskan lewat media massa hanya terhenti di atas kertas. Mengapa demikian, karena limbah PT. IIU masih tetap mengalir dan bau pabrik masih tercium dalam radius 20 km. Kondisi semacam ini membuat Walhi bersuara lantang lewat siaran persnya. Walhi menyuarakan:

*"Bahwa PT. IIU melakukan kebohongan, seolah-olah mereka telah menggunakan paradigma baru teknologi yang ramah lingkungan. Padahal itu hanya seolah-olah, malah pihak IIU tidak melakukan apa pun demi masyarakat dan lingkungan. Karena itu Walhi meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan aspirasi masyarakat untuk menutup total PT. IIU, karena telah merusak lingkungan dan menyengsarakan rakyat".*<sup>35</sup>

Serangan Walhi tentu saja memojokkan pihak PT. IIU. Karena itu PT. IIU lantas mencari perlindungan pada masyarakat Batak. Caranya adalah dengan melakukan perombakan manajemen dengan memasukkan beberapa orang-orang Batak. Sekedar menyebut nama adalah Sabam Leo Batubara (Komisaris), Landung Panjaitan (Komisaris Independen), Dewan Direksi Firman Purba dan Juanda Panjaitan sementara tim pengawas adalah Dr. Polin Pospos.

### ***Pro-Kontra Aksi Penutupan IIU***

---

<sup>33</sup> www. Liputan 6. com

<sup>34</sup> Victor Silaen., op.cit. hlm. 351.

<sup>35</sup> Siaran Pers Walhi, 11 September 2003

Resistensi LSM terhadap PT IIU sepertinya yang tak kunjung usai. Sikap pro-kontra terhadap keberadaan PT IIU menyeruak. Wacana yang berkembang mengarah pada aksi penutupan PT IIU. Yang berujung pada sikap pro-kontra sebagaimana tertera pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Sikap pro-kontra pemerintah terhadap keberadaan PT Indorayon**

Aktor	Penyataan	Tahun
Gubernur	Sorotan masyarakat yang besar sebagai akibat dari meledaknya clonine (B3)	1993
Presiden Habibie	Pemberhentian sementara PT Indorayon	Maret 1999
Sony Keraf Menteri Negara Lingkungan Hidup	Pemberhentian	24 Januari 2000
Megawati Wakil Presiden	Membuka kembali operasi PT Indorayon dengan produk pulp tanpa rayon	Maret 2000
Tengku Rizal Nuriin Gubernur Sumut	Membuka kembali PT Toba Pupis Lestari (ganti dari PT Indorayon)	31 Maret 2001

Diolah Jurnal WACANA. XII/2002.; Kusuma & Fitria Agustin Gelombang *Perlawanan Rakyat*, (Jogyakarta, Insist Press, 2004).

Tabel di atas menjelaskan perjalanan PT. dalam menghadapi perlawanan masyarakat lokal dan LSM. Bagi masyarakat dan LSM satu-satu solusi kongkrit adalah menutup PT. IIU. Tawaran ini dilandasi oleh tiga hal: *pertama*, Indorayon harus tutup tanpa syarat karena telah merusak lingkungan. *Kedua*, Indorayon bukan asset negara melainkan asset segelintir orang. *Ketiga*, warga Porsea sebagai tumbal jika Indorayon dibuka kembali.

Tiga tawaran sudah dianggap final untuk menolak keberadaan PT. IIU. Karena itu setiap keinginan re-operasi PT. IIU senantiasa disambut dengan demonstrasi dari berbagai kalangan. Bahkan demonstrasi di Jakarta bersamaan dengan di Medan. Suaranya sama yakni tutup secara permanen PT. IIU. Selain itu para aktivis LSM juga menghimbau agar

para politisi dan akademisi tidak menggunakan legitimasi politik dan akademisnya untuk memihak Indorayon.

Sikap yang disuarakan masyarakat-LSM ternyata tidak bisa dipenuhi secara total oleh pemerintah. Pada masa pemerintahan BJ Habibie tuntutan masyarakat dikabulkan sekedar untuk meredam resistensi. Karena itu penutupan PT. IJU bersifat sementara. Walhi Sumatra Utara dan Walhi Jakarta menyambut dengan baik keputusan itu. Emmy Hafild mengatakan keputusan tersebut sebagai kemenangan gerakan lingkungan.<sup>36</sup>

Pada era Gus Dur Pemerintah Pusat mendua terhadap kasus PT. IJU. Di satu pihak Menteri Sonny Keraf merekomendasikan BKPM dan otoritas lainnya untuk menutup operasi PT. IJU secara permanen.<sup>37</sup> Usulan ini juga dikuatkan dengan dukungan Gus Dur dan bahkan beberapa anggota DPR. Di lain pihak, Menteri Perindustrian dan Perdagangan meminta kembali beroperasi dengan alasan jika PT. IJU di tutup, investor asing akan takut menanamkan modalnya di Indonesia. Karena itu dalam sidang Kabinet 10 Mei 2000, khususnya karena desakan kuat dari investor asing, pemerintah Gus Dur mengambil keputusan parsial dengan menutup pabrik untuk produksi rayon tetapi melanjutkan pengolahan pulp di bawah kebijakan yang ketat.

Dengan ijin yang diberikan pemerintahan Gus Dur, PT. IJU melakukan perubahan nama yakni PT Toba Pulp Lestari. Selain itu, PT Toba Pulp Lestari juga memanfaatkan media massa untuk membentuk opini publik. Sekalipun demikian, masyarakat dan LSM tetap menolak dan melakukan perlawanan. Sikap keras masyarakat dan LSM terhadap PT Toba Pulp Lestari tidak membuat Toba Pulp Lestari kehilangan akal. Pengusaha mendekati gubernur, tokoh adat, media massa, politisi hingga ilmuwan Batak dalam rangka pembentukan wacana tandingan. Pihak perusahaan bersama-sama pemerintah dan para politisi menggunakan Koran *Sinar Indonesia Baru* (SIB) sebagai corongnya. Koran ini mempunyai peran dalam membendung wacana yang disampaikan oleh masyarakat-LSM. Caranya adalah SIB kerap menampilkan akademisi, politisi, dan aktivis LSM yang pro Indorayon untuk membendung wacana tandingan melalui kekuatan politik dan legitimasi intelektual diharapkan

---

<sup>36</sup> *Kompas*, 16 Februari 1999.

<sup>37</sup> Suharko., *Merajut* op.cit. hlm 224.

memenangkan penerimaan publik.<sup>38</sup>

Strategi lain yang digunakan Toba Pulp Lestari adalah *pertama*, pengangkatan orang-orang Batak dalam kepemimpinan PT Toba Pulp Lestari sebagai tameng untuk menghadapi oposisi rakyat. *Kedua*, Pendeta Dr. Soritua Nababan yang pernah kritis terhadap PT. IJU kini aktif melobi pendeta-pendeta segerejanya untuk menerima kehadiran perusahaan. *Ketiga*, membuat organisasi "Lembaga Sinta Mardongan (Cinta Persaudaraan) yang didanai oleh Tengku Rizal Nurdin, selaku gubernur sebesar 40 Juta. *Keempat*, penyeberangan sejumlah aktivis gerakan kemasyarakatan ke negara dan swasta. Mereka bisa menjadi sumber informasi dan dana bagi gerakan. Tapi sebaliknya, mereka juga dapat menambah kemampuan 'lawan' yakni 'negara dan swasta' untuk melumpuhkan gerakan masyarakat, sebab mereka mengetahui kelemahan internal dan kelemahan seluruhnya gerakan masyarakat dari mana mereka berasal.<sup>39</sup> *Kelima*, menggunakan beberapa aktivis LSM sebagai konsultan untuk melawan LSM yang pro rakyat. *Keenam* Menggunakan akademisi untuk melegitimasi bahwa Indorayon layak beroperasi. *Terakhir*, Redaktur media lokal dan beberapa wartawan dijanjikan untuk mendapatkan 1 persen kalau Indorayon beroperasi.

## Penutup

Dari perjuangan masyarakat Porsae dapat dipelajari satu kasus gerakan politik lingkungan di Indonesia. Dikatakan demikian karena kesuksesan gerakan lingkungan berkat kerjasama yang erat antar LSM. Solidaritas LSM dalam merespon kebijakan PT Indorayon membutuhkan strategi perlawanan. Strategi perlawanan yang dilakukan oleh LSM terhadap PT Indorayon adalah dengan cara memadukan gerakan demonstrasi, jejaring dan jalur hukum dengan memperkarakan PT Indorayon maupun lembaga pemerintah.

Tiga strategi perlawanan ini berhasil memaksa PT Indorayon merubah kebijakannya dan pada saat yang sama pemerintah didesak untuk menghentikan operasi PT Indorayon yang dinilai terbukti melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Ujung akhir dari perlawanan

---

<sup>38</sup> *ibid.*, hlm. 130

<sup>39</sup> George Junus Aditjondro., *op.cit.* hlm. xv; xxv; xxiv; xxxvii.

LSM membuahkan hasil yang maksimal karena berhasil menghentikan operasi PT Indorayon.

Pada titik ini bisa dikatakan bahwa aksi perlawanan LSM di Medan bisa menjadi model dalam gerakan sosial di Indonesia. Pola gerakan perlawanan LSM di Medan sangat berbeda dengan pola gerakan perlawanan LSM selama ini. Gerakan LSM di Medan sangat unik. Oleh sebab itu, ke depan mestinya gerakan perlawanan lebih difokuskan pada kemampuan LSM berjejaring baik ditingkatan lokal, nasional maupun internasional. Dengan kata lain, strategi perjuangan akan lebih efektif berjejaring dalam usaha membangun aksi kolektif ketimbang berdemonstrasi dan pengerahan massa.

Pada aras teoritik, studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang diusung oleh Gene Sharp yang mengedepankan pada protes dan demonstrasi massa akan ditinggalkan oleh para aktor LSM. Alasannya adalah gerakan yang berbasis pada protes dan demonstrasi tidak mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan atau bahkan seringkali menemukan kegagalan. Oleh sebab itu, menjadi logis apabila para penggiat LSM berpaling pada tawaran Jeff Haynes tentang pentingnya pola perlawanan yang mengedepankan menggunakan saluran demokrasi dan hukum. Hal inilah yang akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi eksistensi LSM kini dan masa yang akan datang. \*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

- Anto, J. (2001). *Limbah Pers di Danau Toba*. Yogyakarta: LP3Y dan Kippas.
- Aditjondro, George Junus. (2001), 'Gurita RGM, Pers dan Kedasaran Palsu' Kata Pengantar dalam J. Anto "*Limbah Pers di Danau Toba*", Yogyakarta: LP3Y dan Kippas.
- Culla, Adi Suryadi. (2006). *Rekonstruksi Civil Society* Jakarta: LP3ES, Walhi dan YLBHI.
- Fakih, Mansour. (1996). *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hormat, George Domingo Rinels, (2004), '*LSM di Mata Ormas Gerakan Rakyat: Kawan dan Lawan*' dalam. HCB Dharmawan (ed) *LSM Menyuarakan Nurani Menggapai Kesenjangan*, Jakarta: Kompas.
- Hayne, Jeff. (2000). *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*. Jakarta: YOI
- Keraf, A. Sonny. (2002). *Etika Lingkungan* Jakarta: Kompas.
- Kusuma dan Fitria Agustina. (2004). *Gelombang Perlawanan Rakyat*. Jakarta: Insist
- Sharp, Gene. (1997). *Menuju Demokrasi Tanpa Kekerasan*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suharko. (2005). *Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah dan Pembangunan Tata Pemerintahan Demokrasi (1966-2001)* Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suharko. (2004). '*Negara, Pelaku Bisnis dan Masyarakat Sipil*' dalam Lambang Trijono dkk (ed) *Potret Retak Nusantara*. Jogjakarta: CSPS.
- Silaen, Victor. (2006). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: IRE.
- Wahyudi. (2005). *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani*. Malang: UMM Press.

Hening Parlan. (2002). *"Reposisi Gerakan Lingkungan Menuju Gerakan Sosial"*. Jurnal Wacana, XII/2002

Muhadi Sugiono dan Vicky de Djalong. (2007). *"Gerakan Perlawanan dalam Ruang Politik Global"*. Balairung, Edisi 41/XXII/2007

A. Sonny Keraf. (2000). *'Manusia dan Lingkungan Hidup: Mencari Model Etika Lingkungan'*. Respons, Vol 5, No.02-Juli-Desember 2000.

Kompas, 6 Agustus 2003

Kompas, 16 Februari 1999.

www. Liputan 6. com

Tempo, edisi, 22-28 Mei 2000.

Siaran Pers Walhi, 11 September 2003